

LAPORAN TAHUNAN

INFID 2020



LAPORAN
TAHUNAN
INFID
2020

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Perjalanan INFID Sepanjang 2020	iv
INFID dalam Angka	vi
Testimoni Jaringan INFID	vii
Dewan Pengawas	xii
Dewan Pengurus Sekretariat	xiii
BAB 1: PROFIL	1
35 Tahun Perjuangan INFID	2
BAB 2: PROGRAM INFID 2020	5
A. Program HAM dan Demokrasi	5
B. Program Penurunan Ketimpangan	9
C. Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	11
BAB 3: INFID DALAM MEDIA	14
Media Massa	14
Media Sosial	15
BAB 4: INFID DI TENGAH MASYARAKAT	17
A. Dampak Nyata Kerja INFID	17
B. Inovasi Program	19
LAMPIRAN	20
Lampiran I	20
Lampiran II	21
Lampiran III	22

KATA PENGANTAR

Sugeng Bahagijo

Laporan ini menceritakan data fakta dan rentang kegiatan yang sudah dilakukan INFID selama tahun 2020. Meski menghadapi tahun bencana di 2020, infid tidak berhenti bekerja dan terus menyuarkan kebutuhan dan hak-hak warga Indonesia di masa pandemi

Empat hal menarik bisa menjadi ciri khas perjalanan dan kerja-kerja infid di tahun 2020. *Pertama*, pemantauan dan advokasi kebijakan kepada kinerja dan program pemerintah menolong warga untuk mengurangi dampak pandemi dan dampak sosial ekonomi. Secara lebih khusus, infid telah menyuarkan keadaan dan suara warga dan terutama warga kelompok rentan. Sebagian besar dikerjakan oleh program SDG.

Kedua, menyediakan dukungan aktif kepada rencana kebijakan baru pemerintah-DPR untuk menghapuskan kekerasan seksual (RUU TPKS). Termasuk melalui produksi kajian kualitatif-kuantitatif untuk mendukung RUU dan produksi Surat Terbuka oleh 128 tokoh Indonesia terkemuka, yang dimuat di harian Kompas dan Koran Tempo (Juli 2020). Kegiatan ini digerakkan oleh program Ketimpangan.

Ketiga, merawat dan melanjutkan kerja-kerja pencegahan intoleransi, kebebasan beragama dan berkeyakinan dan penguatan HAM dan Open Government di Indonesia. Baik melalui riset dan advokasi kebijakan. Kegiatan ini dimotori oleh program HAM dan Demokrasi.

Keempat, pelayanan kepada anggota dan mitra kerja INFID melalui berbagai cara, antara lain (a) mendukung kerjasama dengan berbagai kementerian dan lembaga pemerintah; (b) mendukung kerja bareng dengan lembaga mitra pembangunan/lembaga donor; (c) menyediakan bukti dan informasi untuk memastikan keberlanjutan dan pendanaan CSO Indonesia.

Tidak bisa dibantah bahwa tahun 2020 adalah tahun suram dan tahun bencana bagi semua warga. Pandemi COVID19 mendera semua negeri. Bencana skala luas dan besar yang tidak ada contohnya dalam sejarah modern Indonesia. Setara dengan Depresi Besar tahun 1930 an. Dua kali lebih mematikan ketimbang Krismon tahun 1997/1998. Pemerintah dipaksa mengerahkan seluruh daya, tenaga, tekad baik dan imajinasi.

Kita menyaksikan, sistem kesehatan publik kita ternyata underinvestment – kekurangan tenaga Nakes, Alkesnya. Kita melihat, sistem jaminan sosial kita. Kita bersyukur bahwa pemerintah mendukung warga dengan subsidi listrik, PKH dan jaminan sosial baru – bantuan subsidi upah (BSU).

PERJALANAN INFID SEPANJANG 2020

2020 menandai era baru pembangunan dengan penyebaran masif virus COVID-19 di seluruh dunia, yang kemudian dilabeli sebagai era pandemi. Terjadi perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat yang dipaksa berubah dalam waktu yang singkat. Di antara disrupsi dan perubahan yang muncul adalah kegiatan serba digital yang merata hampir di seluruh lini kegiatan masyarakat, mulai dari pendidikan, jual-beli, acara, hingga pertemuan formal maupun non-formal. Tak terkecuali INFID yang memitigasi dampak pandemi dengan melakukan transisi digital dalam kegiatan advokasi, konsultasi, penelitian, dan seminar.

Pandemi tidak memperlambat laju kerja INFID. Dalam hal publikasi, setidaknya INFID menghasilkan 13 materi publikasi penelitian tentang berbagai macam isu sepanjang 2020. Materi publikasi ini berupa Kertas Kebijakan, Laporan Penelitian, serta buku. Dari seluruh penelitian ini, didominasi oleh penelitian dalam isu advokasi RUU P-KS (Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual) dan kesetaraan gender.

INFID sedang menyusun riset bagian dari Prioritas Riset Nasional (PRN) dengan tema **“Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Mendorong Kesetaraan Gender di Era Demokrasi 4.0 di Indonesia”** atas dukungan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Proses riset dilakukan sejak Juli 2020 hingga September 2021.

Selain itu, INFID bersama Komnas HAM dan KSP (Kantor Staf Presiden) juga tetap melaksanakan acara tahunan Festival HAM 2020 di tengah pandemi. Dengan mentaati aturan protokol kesehatan yang ketat. Festival HAM untuk pertama kalinya dilaksanakan secara *hybrid* pada 17-19 Desember 2020: luring di kota Banjarmasin, Kalimantan Tengah dan daring melalui *platform* Zoom. Festival ini diisi dengan kegiatan konferensi yang terdiri dari empat rapat pleno, delapan pertemuan paralel, dan *side events* dengan total 93 orang narasumber. Acara ini juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan lainnya, seperti pertunjukkan musik dan pameran virtual. Situasi pandemi tidak menyurutkan antusiasme sekitar 1.000 peserta yang hadir dari berbagai kabupaten/kota di Indonesia dan negara lain, termasuk Korea Selatan, Belanda, Thailand, Taiwan, Hongkong, India, Denmark, dan Amerika Serikat.

Sebagai rangkaian kegiatan menuju Festival HAM 2020, INFID bersama Komnas HAM juga menyelenggarakan Pelatihan Kabupaten/Kota HAM bagi Aparatur Pemerintah Daerah dan Aktivistis Masyarakat Sipil yang ke-4 kalinya. Pelatihan ini diikuti oleh perwakilan dari lebih dari 45 Kabupaten/Kota, seperti: Bandung, Banyuwangi, Banda Aceh, Bantaeng, Bojonegoro, Karanganyar, Salatiga, Batang, Makassar, Palu, Surabaya, Wonosobo, Yogyakarta, Bogor,

Sambas, Karo, Jember, Malang, Yogyakarta, Manggarai Timur, dan sebagainya. Melalui penyelenggaraan ini, INFID berperan dalam menghadirkan nilai-nilai HAM pada tingkat daerah melalui kegiatan yang interaktif.

Dalam bidang pembangunan, INFID aktif mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengadopsi prinsip *Open Government Partnership* (OGP) atau pemerintahan terbuka dan mempromosikan praktik baik di tingkat lokal. INFID juga melakukan pendampingan daerah untuk berpartisipasi sebagai OGP local. INFID mendorong sejumlah daerah untuk berpartisipasi dalam OGP Local, di antaranya adalah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dan Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

Secara kelembagaan, Anggota INFID di tahun 2020 bertambah jumlahnya, dari 66 menjadi 88 Anggota. Dalam Rapat Badan Pengurus INFID pada Senin, 27 April 2020, dinyatakan bahwa Badan Pengurus menerima 18 lembaga dan satu individu sebagai Anggota baru INFID. Adapun Pengesahan Keanggotaan Baru INFID akan dilakukan pada Sidang Umum (*General Assembly*) INFID yang dijadwalkan pada tahun 2021.

Sekretariat INFID bertugas untuk mendorong dan memfasilitasi keterlibatan aktif dari para Anggota dalam semua kegiatan. Terkait hal tersebut, Sekretariat INFID di tahun 2020 telah melakukan beberapa kegiatan antara lain: memfasilitasi Anggota (Migrant Care, Yayasan Jurnal Perempuan dan Koalisi Perempuan Indonesia) untuk memperkenalkan lembaga dan mempromosikan programnya kepada mitra pembangunan dalam kegiatan donor meeting. Sepanjang 2020 telah dilaksanakan sebanyak empat kali, yakni di bulan Februari, Juli, September dan Desember. Seluruh kegiatan tersebut dilakukan secara daring karena kondisi pandemi. Kegiatan lain adalah menginformasikan adanya peluang pendanaan dari berbagai mitra pembangunan di seluruh dunia kepada Anggota INFID melalui milis. Untuk memfasilitasi para Anggota dalam berkomunikasi, berbagi pengetahuan, hasil riset dan aktivitas, Sekretariat membentuk jejaring *Whatsapp Group*.

Sepanjang 2020, INFID setidaknya telah tiga kali melakukan penandatanganan nota kesepahaman; 1) pada bulan Juni dengan PW Fatayat NU Jawa Barat dan PW Fatayat NU Jawa Timur, 2) bulan Juli dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan 3) pada bulan Oktober dengan *United in Diversity*.

INFID DALAM ANGKA



35 tahun

Usia INFID



56 kegiatan utama dan **228** aktivitas sepanjang 2020

Program Ketimpangan:

19 kegiatan utama dan 50 aktivitas bersama jaringan yang dilaksanakan sejak November 2019 sampai Desember 2020 dengan 44 jumlah liputan

Program HAM:

32 kegiatan utama dan 113 aktivitas yang dilaksanakan sejak bulan Januari sampai Desember 2020, 90 liputan



11 Jumlah Publikasi sepanjang 2020

**Total
203 Liputan**

**44
Liputan
Ketimpangan**

**90
Liputan
HAM**

**69
Liputan
SDGs**

Media Sosial:



Facebook:

Sebanyak 7.210 yang menyukai di 2020 dan 7.177 likes di 2019 (naik 0.46 %)



Twitter:

Followers Naik 5.25 Persen (213 Follower), dari 3.848 (2019) menjadi 4.061 (2020)



Instagram:

Followers naik 27.58 Persen (889 Follower), 2.334 (2019) menjadi 3.223 (2020)



Youtube:

Produksi naik dari 76 (2019) Video Menjadi 135 Video (2020), Naik 43%. Subscribers naik 69.65 Persen, dari 237 Subscribers (2019) menjadi 781 (2020)



**Jumlah Dana Dikelola 2020:
Rp. 10.973.458.559**

1. Oxfam (GRAISEA & CSO-LA)
2. Ford Foundation
3. P R N - Ristek
4. KURAWAL FOUNDATION
5. NED - Y3
6. UNDP
7. ADN
8. HARMONI
9. MADANI
10. TAF-IKA
11. Local Donation



Struktur Lembaga:

5 Dewan Pengawas, 7 Dewan Pengurus, 5 Penasehat Ahli, dan 25 Eksekutif

TESTIMONI JARINGAN INFID



Hendrar Prihadi,
Walikota Semarang

The International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) that plays an important role to encourage Semarang Municipality to commit about issues on human rights, open government, SDG's, democracy and development. We are very grateful for the existence of INFID in Indonesia. INFID has encouraged us to be more active in many International and National events such as Human Rights Festival, Open Government Partnership (OGP), Asia Democracy Network (ADN), and World Human Rights Cities Forum (WHRCF). I believe that the existence of INFID in Indonesia is beneficial for Semarang City. We look forward to having the next collaboration with INFID.



Dewi Winarti,
Ketua PW Fatayat NU Jawa Timur

Kinerja INFID baik, tepat waktu dan pendampingan ke tim mitra cukup egaliter. Banyak pembelajaran yang dapat kami ambil dari kerjasama ini, antara lain: 1. Membangun mekanisme kontrol yang lebih baik; 2. Penguatan SDM kelembagaan dari sisi pelaporan; dan 3. Membangun proses kemitraan dengan mitra stakeholder dengan pendekatan setara. Harapan kami kerjasama ini bisa dilanjutkan untuk penguatan dan pendampingan di komunitas (*resilience community*) serta mengawal kebijakan untuk isu ekstrimisme. Fatayat NU Jatim siap bekerjasama dengan INFID dalam pengembangan mitra jaringan serta penyiapan komunitas maupun struktural lembaga sampai tingkat desa



Ruli Insani Aditya,
Rehab Dinsosnangkis (Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan) Kota Bandung

Apresiasi yang tinggi dan terima kasih kepada INFID atas pelibatan Dinas Sosial Kota Bandung dalam rangkaian kegiatan INFID. Kerjasama terkait pembangunan kemanusiaan telah membuka dan menambah wawasan kami terkait pencegahan dan penanganan kekerasan dan ekstrimisme.

Kami menilai bahwa INFID MAMPU dan MAU memberikan komitmen dan bukti nyata untuk berkontribusi bagi Indonesia, serta sudah jauh memandang ke depan untuk mengantisipasi ancaman-ancaman radikal terorisme. Kami mendukung program-program INFID dan seluruh divisinya agar dapat terus berbagi manfaat untuk pemerintah dan masyarakat Indonesia.



Ahmad Zainul Hamdi,
Chief Executive Officer Arrahim.ID

Arrahim.id adalah sebuah portal keislaman yang berkomitmen untuk menyuarakan pesan-pesan perdamaian kepada publik dengan mengambil sudut pandangan keagamaan secara umum maupun keislaman. Dalam melakukan misi ini, kami mengkapitalisasi beragam sumber, termasuk pandangan tokoh-tokoh agama, dalam hal toleransi, pluralisme, demokrasi, HAM, dan perdamaian. Sasaran strategis kami adalah kalangan muda yang menempati porsi terbesar dalam struktur kependudukan Indonesia saat ini.

Selama ini, Arrahim.id bisa dikatakan tidak memiliki dukungan apapun dari pihak luar. Satu-satunya kekuatan Arrahim.id adalah semangat dan jaringan. INFID adalah mitra pertama yang memberi dukungan kepada Arrahim.id sehingga kami bisa melakukan pengembangan program lebih baik.

Melalui dukungan INFID, Arrahim.id berhasil membangun jaringan penulis muda lintas-iman. Melalui dukungan INFID juga, Arrahim.id berhasil menerbitkan tiga puluh 30 tulisan anak muda tentang berbagai gagasan kemanusiaan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Saat ini Arrahim.id berhasil mengembangkan podcast. Produksi podcast pertama dilakukan pada pertengahan Desember 2020. Hingga saat ini, Arrahim.id telah mempublikasikan 13 video (rerata 5 video di-up load setiap bulan); 11.258 penonton, 905 jam durasi tonton publik, dan 476 subscriber. Kami bisa sampai tahap ini karena dukungan INFID.

Arrahim.id berharap agar INFID terus melakukan kerja-kerja pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana yang selama ini telah dilakukan. Dalam konteks relasinya dengan Arrahim.id, kami berharap agar terjalin kerja sama lebih baik dan lebih luas, misalnya, *capacity building*, kampanye bersama, memperluas jaringan, dan sebagainya. Arrahim.id merasa menjadi partner bagi kerja advokasi INFID. Hal ini tidak semata-mata dalam pengertian partner formal yang terikat dalam sebuah kerja sama, tapi juga partner substansial yang memiliki komitmen bersama untuk membangun kehidupan yang demokratis, toleran, dan damai. Arrahim.id menyediakan diri untuk menjadi media partner bagi pesan-pesan INFID yang perlu disuarakan di ruang publik.



Manhan Marbawi,
Ketua Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII)

Inisiatif program yang dilakukan oleh INFID dalam mempromosikan isu-isu inklusif, pencegahan kekerasan ekstrimisme (*preventing violent extremism, PVE*) atau serta dukungan terhadap implementasi RAN PE (Rencana Aksi Penanggulangan Ekstremisme) sangat optimal dan mendorong inisiatif-inisiatif baru dari rekan CSO mitra Infid. Sebagai mitra INFID, AGPAII mendorong implementasi PVE di sekolah. Harapan untuk INFID, semakin menguatkan jejaring mitra CSO dalam mempromosikan isu-isu inklusifitas, pencegahan kekerasan ekstremisme dan membangun perdamaian melalui sektor pendidikan. Kami juga berharap, ke depan INFID harus menjadi inisiator jaringan CSO dan menginisiasi/ koordinator program Implementasi RAN PE.



Dr. Kastorius Sinaga,
Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media

Kami menyambut baik laporan publik tahunan INFID ini. Sebagai salah satu lembaga OMS (organisasi masyarakat sipil), INFID telah mampu menunjukkan dan terus mengembangkan integritas manajemennya, baik dari sisi pengelolaan kegiatan, keuangan maupun dari sisi akuntabilitas publik sebagaimana ditunjukkan oleh laporan publik tahunan ini.

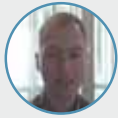
Kepercayaan Publik (*public trust*), dalam pengertian multistakeholder, merupakan salah satu sumber legitimasi dari sebuah OMS seperti INFID. Karenanya untuk menjaga legitimasi tersebut, laporan tahunan menyangkut kegiatan, pencapaian sasaran, pengelolaan sumberdaya keuangan perlu dipublikasikan ke publik agar publik dan seluruh multistakeholder dapat menilai kinerja INFID dengan baik, sembari melembagakan budaya transparansi di dalam gerakan OMS di Indonesia.

Selamat untuk INFID. Semoga di tahun-tahun mendatang semakin aktif berpartisipasi di dalam memajukan demokrasi, partisipasi, pluralisme dan pemberdayaan masyarakat di Indonesia.



Drs. H. Abdul Kholiq Arif, M.Si,
Bupati Wonosobo (2005-2016)

Kehadiran INFID sangat strategis dalam proses pengenalan program pembangunan berkelanjutan yang disepakati dunia, terutama bagi pemegang otoritas dan kekuasaan politik nasional, regional dan lokal kabupaten/kota di Indonesia. INFID mampu memilih *lead* program yang menjadi *basic need* kabupaten kota. Salah satu contohnya adalah pengalaman kerjasama INFID dengan Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah.



Walter L Doetsch,

***Direktur Kantor Ketangguhan Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan
USAID Indonesia***

USAID Indonesia menghargai INFID atas temuan dan rekomendasi dari hasil studi. USAID menegaskan komitmennya untuk mendukung proses konsolidasi demokrasi di Indonesia dan mengakui peran penting organisasi masyarakat sipil dalam mempromosikan demokratisasi dan pemerintahan yang lebih kuat di Indonesia. Pemerintah Amerika Serikat, melalui Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), mendukung lembaga-lembaga demokrasi Indonesia dan sangat yakin bahwa organisasi masyarakat sipil memainkan peran penting dalam mendorong demokratisasi dan pemerintahan yang lebih kuat.

Saya mengucapkan selamat kepada INFID yang telah berbagi hasil survei COVID-19 dan berharap informasi berharga ini bermanfaat untuk lebih memperkuat kemampuan Pemerintah Indonesia dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, terutama dalam memberikan respons COVID-19 saat ini



Taufik Basari, S.H, S.Hum, LL.M,

Anggota Komisi III DPR RI, Fraksi Partai NasDem

Komitmen INFID dalam mengawal program penurunan ketimpangan, SDGs dan Hak Asasi Manusia (HAM) sudah tidak diragukan lagi. Salah satu program yang menjadi gebrakan besar INFID dalam mendorong pemajuan HAM di Indonesia adalah konsep Kota Ramah HAM, yang berlangsung sejak tahun 2014. Oleh karena itu, saya sangat mengapresiasi dan semangat untuk bekerja sama ketika pada 2020 INFID “melebarkan sayap” ke isu-isu perempuan dan gender.

Satu tahun belakangan ini kami intens berkoordinasi mendorong segera disahkannya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Saya banyak terlibat dalam rangkaian webinar, diskusi terbatas, hingga RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) INFID di Badan Legislasi terkait hasil risetnya bersama IJRS (Indonesia Judicial Research Society) tentang “Persepsi dan Tingkat Dukungan Stakeholders di Tingkat Nasional kepada RUU P-KS”. Kerja sama saya dan INFID adalah bukti bahwa DPR RI dan masyarakat sipil dapat bergerak bersama dalam memperjuangkan isu-isu yang penting di masyarakat.



Dio Ashar Wicaksana,
Direktur Eksekutif Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

Setahun terakhir ini saya bekerja sama dengan INFID dalam melakukan survei persepsi publik terhadap pengaturan kekerasan seksual dan perkawinan anak. Kegiatan ini berhasil mendapatkan data persepsi masyarakat Indonesia secara nasional. Bahkan data ini akhirnya bisa membawa advokasi kepada pihak eksekutif maupun legislatif. Semoga akhirnya data survei ini bisa membawa manfaat baik bagi kebijakan penghapusan kekerasan seksual dan perkawinan anak.



Roos Diana Iskandar,
Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan, Manusia dan Kebudayaan

Meskipun belum lama berkolaborasi dengan INFID, terutama dalam isu kekerasan terhadap perempuan dengan mengangkat isu kekerasan seksual, namun terlihat nyata sumbangan pemikiran INFID yang maju dan konstruktif dalam kajiannya. Saya memberikan apresiasi atas berbagai dukungan Infid dalam upaya ikut memecahkan masalah untuk kemajuan bangsa.

DEWAN PENGURUS



Dian Kartikasari
Ketua



Totok Yulianto
Wakil Ketua



Nawawi Bahrudin
Sekretaris



Teddy Alfonso
Bendahara



Sarah Lery Mboeik
Anggota



Suryati Simanjuntak
Anggota



Odi Shalahuddin
Anggota

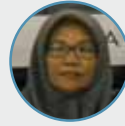
DEWAN PENGAWAS



Khairani Arifin



Puspa Dewi



Istiatun

PENASEHAT AHLI



Zumrotin K. Susilo



Muhammad AS Hikam



Mickael Bobby Hoelman



Bagus Takwin



Aris Arif Mundayat

EKSEKUTIF



Sugeng Bahagijo
Direktur Eksekutif



Aditiona Dewi Eridani
Senior Program Officer Partnership
& Membership



Mugiyanto
Senior Program Officer Human
Rights & Democracy



Aulia Rachmah Putri
Program Officer on Human Rights
and Democracy



Tatat
Program Manager & PO Inequality



Megawati
Program Assistant on In-Equality



Lola Loveita
Senior Program Officer on Human
Rights and Democracy, Preventing
Violent Extremism /PVE



Abdul Waidl
Senior Program Officer on Human
Rights and Democracy, Preventing
Violent Extremism /PVE



Nadia Yunita
Program Assistant on Human Rights
and Democracy Preventing Violent
Extremism/PVE



Sanita Rini
Program Assistant on Human Rights
and Democracy Preventing Violent
Extremism/PVE



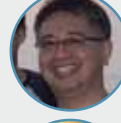
Bona Tua P.P (Bona)
Program Officer SDGs



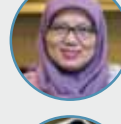
Denisa Amelia Kawuryan
Program Assistant on SDGs



Jeckson Robinson
Asisten Program



Robert Pramudarto
Finance Director



Misnawati Syamsir
Finance Manager



Ima Desiyanthi
Accounting Officer



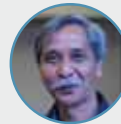
Rini Widyastuti
Finance and Budgeting



Florence
HRD Manager



Suwarno
IT & Procurement Officer



Sabarno
Operational Officer



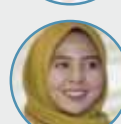
Wasiton
Assistant Operational Officer



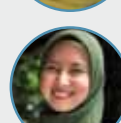
Intan Kusumaning Tyas
Communication & Campaigner
Officer



Alyaa Nabilah Zuhroh
Program Support Human Rights &
Democracy HAM



Desy Al Hasyah
Social Media Intern



Rizka Antika
Program Assistant In Equality



BAB 1:

PROFIL

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) didirikan pada tahun 1985. Sejumlah tokoh masyarakat sipil turut membidani INFID, antara lain Presiden RI 1999-2004 KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Asmara Nababan (Aktivis HAM), KH Ghaffar Rahman (Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama 1989-1994), Adnan Buyung Nasution (pengacara dan pendiri YLBHI), Prof. DR. M Dawam Rahardjo (ekonom dan aktivis kebebasan beragama), Fauzi Abdullah (aktivis buruh), Kartjono (aktivis masyarakat pedesaan), dan Zoemrotin KS (Tokoh perempuan dan gerakan masyarakat sipil).

Sejak 2004, INFID berstatus sebagai lembaga yang diakui dan terakreditasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan *UN Special Consultative Status with the Economic and Social Council (ECOSOC)*. INFID merupakan satu dari hanya dua lembaga di Indonesia yang diberikan status ini. Dengan status ini, INFID memiliki akses untuk terlibat dalam berbagai konferensi internasional yang diselenggarakan oleh PBB, seperti *High Level Political Forum* untuk membahas agenda pembangunan berkelanjutan yang diadakan setiap bulan Juli, dan Sidang Umum setiap bulan September.

INFID juga merupakan anggota aktif di FORUS sejak 2009. FORUS adalah sebuah jaringan NGO global yang mewadahi forum-forum NGO nasional di seluruh dunia yang berbasis di Paris, Prancis (<http://forus-international.org/en>). INFID juga bagian dari *Beyond 2015*, *TAP Network*, dan *SDSN*, yaitu inisiatif-inisiatif global yang bertujuan untuk mendorong pelaksanaan dan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) pada 2030.

Dalam mendorong pelaksanaan program pemerintahan terbuka melalui **Open Government Partnership/OGP**, INFID juga menjadi *Envoy dan Steering Committee* dalam OGP Global (www.opengovpartnership.org/action-network/). INFID berperan dalam mengawal pembangunan di daerah-daerah di Indonesia dengan memberikan masukan-masukan strategis, serta berbagi pengalaman dengan sesama komite dari berbagai negara. INFID juga mewakili OGP dalam berbagai forum tingkat tinggi untuk berbagi pengalaman praktik baik dalam membangun agenda pemerintahan terbuka. Kerja keras INFID mendapatkan apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri RI melalui pemberian Penghargaan Ormas 2017 Bidang Sosial Kemanusiaan.

35 Tahun Perjuangan INFID

INFID berperan penting dalam proses pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Indonesia. Dampak perjuangan INFID dalam memerangi kemiskinan sebagai bagian dari tujuan pembangunan tercatat melalui penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, rasio kemiskinan berkurang hingga satu digit menjadi 9,66 persen pada September 2018. Selain itu, advokasi INFID dalam proses perwujudan pembangunan desa yang layak air dan sanitasi membuahkan hasil konkret di Kabupaten Tangerang, yaitu dengan adanya alokasi anggaran Rp 6 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk pembangunan dan perbaikan sanitasi.

Dari sisi regulasi, advokasi INFID dalam pembangunan berhasil mendorong terbitnya Keputusan Menteri PPN/Bappenas No. 64/2018 tentang Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar Pembangunan Berkelanjutan sebagai upaya serius pemerintah untuk membuat peta jalan perwujudan SDGs di Indonesia.

Upaya keras dan suara lantang INFID untuk mengawal implementasi *United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)* di Indonesia menemui titik terang. UNGPs adalah sebuah pedoman internasional pelaksanaan HAM dalam bisnis yang penting diadopsi oleh negara dan korporasi. Setelah melakukan berbagai proses advokasi dari INFID melalui penelitian, seminar, hingga konsultasi, pada 2019, Kementerian Hukum dan HAM RI menyusun peta jalan Rencana Aksi Nasional bisnis dan HAM. Tidak hanya itu, inisiatif dan model praktik bisnis yang mendukung pemenuhan HAM mulai bertumbuh subur.

INFID juga bergerak menyuarakan sejumlah rekomendasi mengenai pelatihan vokasi dan ketenagakerjaan bagi perempuan dan pemuda. Hasilnya, Presiden Joko Widodo menyatakan pelatihan dan pendidikan vokasi akan menjadi prioritas pembangunan nasional mulai 2018. Pemerintah juga merencanakan Kartu Pra-Kerja untuk meningkatkan kesiapan pemuda Indonesia untuk memasuki pasar tenaga kerja.

INFID telah berhasil mendorong akuntabilitas pemerintah Indonesia (*governance and development*), khususnya yang berkaitan dengan target pencapaian *Millennium Development Goals* atau MDGs 2015. Meski demikian, laporan resmi pemerintah Indonesia mengakui adanya sejumlah target yang tidak bisa dicapai hingga tahun 2015.

Pada 2015, agenda MDGs dilanjutkan menjadi agenda SDGs (*Sustainable Development Goals*) untuk periode 2015–2030. SDGs memiliki 17 Tujuan dan 169 Indikator yang harus dicapai pada tahun 2030. Seperti MDGs, INFID juga turut berperan aktif untuk mendorong pencapaian tujuan dan Indikator SDGs, di antaranya melalui penyusunan kerangka regulasi Perpres SDGs No. 59 Tahun 2017 dan penyusunan kerangka kelembagaan, yaitu tim pelaksana dan pokja nasional.

Selain itu, INFID juga mendampingi 10 Kabupaten Kota dalam pelaksanaan SDGs di tingkat daerah dengan tujuan memberikan praktik baik implementasi SDGs yang akan memberi inspirasi bagi daerah lainnya untuk turut melaksanakan pencapaian SDGs di tahun 2030.

Kerja keras dan capaian di atas, memperkuat kerja-kerja sebelumnya. INFID telah bekerja untuk mengangkat beban utang luar negeri (*finance & development*) menjadi agenda utama pemerintah dan lembaga-lembaga donor, yang saat itu mematok beban utang tidak lebih dari dua persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Negara-negara pemberi pinjaman seperti Jerman, Amerika Serikat, Italia kemudian memberikan keringanan utang (*debt relief*). INFID telah berhasil memulai dan mendorong pelaksanaan akuntabilitas dan keterbukaan pendanaan pembangunan (*finance & development*) Indonesia.

INFID tercatat sebagai aktor utama dalam memperbaiki relasi yang lebih setara (*governance and development*) antara donor dan penerima. Pembubaran forum donor untuk *Indonesia Consultative Group on Indonesia* (CGI) tahun 2007 merupakan perubahan besar bagi Indonesia dan lembaga donor. Lembaga donor juga mengakui bahwa mereka selalu dipantau dan diawasi oleh INFID untuk membuat mereka lebih terbuka, transparan, dan jujur dengan peranan mereka.

Konferensi tematik dua tahunan INFID (1998–2004) telah mengubah kebijakan dan praktik lembaga donor dan lembaga keuangan internasional (Bank Dunia). Salah satu konferensi mengangkat tema mengenai data kebocoran 30 persen dalam dana utang luar negeri dari pinjaman Bank Dunia untuk berbagai proyek di Indonesia.

INFID telah berperan penting dalam mewujudkan proses demokratisasi di Indonesia (*human rights and development*) ketika Indonesia tunduk pada sistem otoriter di bawah rezim Orde Baru. Peran penting tersebut dilakukan melalui berbagai upaya dan usulan regulasi, antara lain tentang hak asasi manusia, kebebasan pers, *rule of law*, hak-hak buruh, partisipasi warga, dan keadilan gender.





BAB 2: PROGRAM INFID 2020

A. Program HAM dan Demokrasi

Tahun 2020 menandai perjalanan 22 tahun reformasi. Reformasi dimaknai sebagai sebuah transformasi dari sistem yang tidak demokratis (otoritarianisme-militerisme Orde Baru) menjadi sistem yang demokratis. Pertanyaannya, apakah 2 dasawarsa masa transisi reformasi telah benar-benar mengantarkan kita menuju demokrasi?

The Freedom House, lembaga riset demokrasi asal Amerika Serikat memberikan rapor demokrasi yang relatif kurang baik bagi Indonesia pada tahun 2020¹. Indonesia mendapatkan skor 59 dari 100 dengan status *partly-free*. Artinya, tingkat kebebasan Indonesia pada tahun 2020 masih sedikit di atas 50 persen. Bahkan angka ini mengalami penurunan secara berturut-turut sejak 2018 dengan nilai 62 lalu menurun ke 61 pada 2019.

Di antara yang mendapatkan rapor buruk adalah terkait dengan kebebasan beragama. Keadaan kurang baik dalam hal kebebasan beragama dapat terkonfirmasi dari beberapa penelitian. Misalnya, sepanjang 2020, Setara Institute mencatat ada 180 peristiwa dan 412 tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) terjadi di Indonesia. Sebagian besar pelanggaran tersebut bahkan dilakukan oleh negara. Indonesia mengakui enam agama, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Bagi anggota masyarakat yang memiliki agama atau kepercayaan tersebut, diperbolehkan untuk mengosongkan bagian kolom agama pada Kartu Tanda

¹ Selengkapnya <https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2021>

Penduduk (KTP). Namun, di lapangan mereka yang tidak mencantumkan agama pada kartu identitas seringkali mengalami diskriminasi. Kekerasan terhadap Muslim Ahmadiyah dan Syiah juga masih terjadi.

Isu ekstrimisme dan terorisme juga mewarnai perjalanan demokrasi Indonesia di 2020. Anak muda diidentifikasi makin banyak yang terlibat sebagai aktor gerakan tersebut. Berdasarkan data sasaran program deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Februari 2017, memperlihatkan lebih dari 52% narapidana teroris yang menghuni lembaga pemasyarakatan adalah generasi muda (usia 17 – 34 tahun). Data BNPT juga menunjukkan adanya peningkatan statistik perempuan yang ditangkap terkait kasus terorisme pada 2016-2020 menjadi 40 orang. Angka ini naik tajam 13 kali lipat dari 2015 dengan jumlah tiga orang.

Media sosial juga menyuguhkan banyak ujaran kebencian dan berita *hoax*. Media sosial hadir untuk mengeratkan komunikasi antar pengguna, sarana berbagi pengalaman dan pengetahuan, meluaskan jaringan, dan membuat kehidupan menjadi lebih produktif. Namun, kepentingan politik kekuasaan dan persebaran ideologi telah menjadikan para pengguna media sosial, sadar dan tidak sadar, sebagai bagian dari aktor yang memproduksi dan meluaskan ujaran kebencian, inspirasi terorisme, dan menurunkan derajat berdemokrasi.

Peran dan Kontribusi INFID

Sepanjang 35 tahun perjalan, posisi INFID tidak pernah absen dari upaya mewujudkan Indonesia yang toleran dan demokratis. Melalui program-programnya, INFID menggawangi berbagai macam kegiatan yang mendorong marwah ‘berbeda namun tetap satu’ dalam Bhinneka Tunggal Ika untuk terus hidup dan menjadi karakteristik bangsa Indonesia yang tak akan pernah tergeser di tengah tantangan globalisasi. Salah satunya adalah laju paham radikalisme dan ekstrimisme yang semakin deras di era digital saat ini. Pandemi COVID-19 yang mulai menghantam dunia sejak awal 2020, tidak membungkam penyebaran paham radikal dan ekstrimisme, justru semakin subur melalui kalan-kanal digital.

Menyikapi dinamika global ini, INFID melakukan berbagai kegiatan untuk melawan narasi-narasi radikal dan ekstrim di Indonesia. INFID bekerja sama dengan Jaringan Gusdurian, NU Online, Islami.co, Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS), Laboratorium Psikologi UI, IBTimes.ID, Arrahim.id, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII), Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI), para ahli, dan praktisi akademik. Tujuan besar dari program ini adalah untuk mempertahankan dan memperkuat demokrasi dan pluralisme melalui penguatan peran pemerintah dan masyarakat sipil dalam mencegah radikalisme, ekstremisme, dan intoleransi.

INFID melancarkan kampanye dari berbagai lini. Dari lini publikasi, INFID setidaknya menghasilkan empat materi publikasi penelitian sepanjang 2020. Melalui penelitian ini, INFID

mengusulkan empat rekomendasi utama; 1) Pemerintah perlu menyediakan laporan berkala yang dapat diakses oleh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) mengenai kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan, serta rencana yang akan dilakukan, 2) Membuka akses pendanaan yang berkelanjutan dan informasi mengenai pendanaan kepada OMS, 3) Mengorganisasikan sebuah forum atau pertemuan terbuka bagi seluruh pembuat kebijakan dan OMS di Indonesia secara berkala, 4) Menganalisa faktor penyebab, seperti kerentanan sosial, politik, dan ekonomi.

INFID juga melakukan survei di enam kota besar (Surabaya, Surakarta, Bandung, Yogyakarta, Makassar, Pontianak) yang bekerja sama dengan Jaringan Gusdurian. Melalui survei ini, INFID berkontribusi dalam menghasilkan data yang terbaru yang penting untuk menjadi rujukan oleh berbagai pemangku kepentingan dan pemerintah dalam membuat kebijakan untuk melawan ekstremisme dan radikalisme. Hasil survei ini menunjukkan adanya perubahan positif pada cara pandang seseorang dalam melihat isu intoleransi dan anak muda menjadi lebih toleran.

INFID melakukan kampanye *online* bersama dengan Islami.co sebagai bentuk intervensi atas narasi intoleransi dan ekstremis yang semakin meluas di internet dan media sosial. Melalui kampanye ini, sebanyak 25 artikel, 6 video, 25 infografis, 3 kegiatan Instagram Live, dan empat *thread* telah diproduksi dan ditampilkan di media online. Sepanjang 2020, total jangkauan kampanye online mencapai 3.407.827 *view* dan 363.009 *engagement*. Ada pula kerjasama dengan IBTimes dan Arrahim.id yang menghasilkan 40 artikel dan 5 podcast narasi moderasi Islami, juga 30 artikel dan 6 podcast terkait pemikiran Gus Dur dari perspektif agama yang demokratis dan humanis. Selain itu, INFID dan NU Online berkolaborasi melaksanakan pelatihan untuk para 15 *da'i* dan *da'iyah* milenial dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pelatihan *Da'i* Muda ini untuk mengkampanyekan pesan-pesan damai dan toleransi di internet dan media sosial.

Langkah lainnya adalah melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mengedepankan nilai-nilai keberagaman dan hak asasi manusia. Tahun 2020, INFID bersama Komnas HAM dan KSP telah menyelenggarakan Pelatihan Kabupaten/Kota HAM bagi Aparatur Pemerintah Daerah dan Aktivis Masyarakat Sipil yang ke-4 kalinya. Pelatihan ini diikuti oleh perwakilan lebih dari 45 Kabupaten/Kota di Indonesia, seperti: Bandung, Banyuwangi, Banda Aceh, Bantaeng, Bojonegoro, Karanganyar, Salatiga, Batang, Makassar, Palu, Surabaya, Wonosobo, Yogyakarta, Bogor, Sambas, Karo, Jember, Malang, Yogyakarta, Manggarai Timur, dan sebagainya.

Pembangunan kapasitas pemahaman nilai-nilai toleransi dan HAM yang dilakukan INFID juga menasar guru sebagai aktor penggerak toleransi dan perdamaian di kalangan pendidikan. INFID menyusun modul bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan guru sejarah. Sebagai tambahan, kegiatan ini juga menghasilkan dua buku panduan tentang sejarah peradaban Islam dan Pengarusutamaan Nilai-Nilai HAM, Toleransi, dan Demokrasi.

INFID bersama Komnas HAM RI dan Kantor Staf Presiden (KSP) juga tetap menggelar acara tahunan Festival HAM 2020 di tengah pandemi. Dengan mentaati aturan protokol kesehatan yang ketat, Festival HAM untuk pertama kalinya dilaksanakan secara *hybrid* pada tanggal 17-19 Desember 2020; luring di kota Banjarmasin, Kalimantan Tengah dan daring melalui *platform* Zoom dengan total 93 orang narasumber. Acara ini juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan lainnya, seperti pertunjukkan musik dan pameran virtual. Situasi pandemi tidak menyurutkan antusiasme sekitar 1.000 peserta yang hadir dari berbagai kabupaten/kota di Indonesia dan negara lain, termasuk Korea Selatan, Belanda, Thailand, Taiwan, Hongkong, India, Denmark, dan Amerika Serikat.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan pra-Festival HAM, INFID bersama Komnas HAM RI kembali berpartisipasi dalam *World Human Rights Cities Forum (WHRCF) 2020*. INFID dan Komnas HAM mengisi dua sesi yang dirangkum dalam *Indonesian Human Rights Cities Session*. Secara khusus, tema utama yang diangkat adalah mengenai Kabupaten/Kota HAM. Selain itu, agenda ini juga membahas kaitan antara Kabupaten/Kota HAM dengan Pencegahan Ekstremisme-Kekerasan (PE). Ekstremisme-Kekerasan merupakan hambatan besar dalam mewujudkan penegakan HAM secara umum dan sangat relevan bagi Indonesia serta komunitas global.

INFID juga mendukung upaya deradikalisasi di Indonesia. INFID bermitra dengan Pimpinan Wilayah (PW) Fatayat NU Jawa Barat dan Pimpinan Wilayah (PW) Fatayat NU Jawa Timur untuk melakukan berbagai kegiatan dengan tujuan meningkatkan sistem reintegrasi untuk penanganan dan pendampingan deportan dan/returni perempuan dan anak korban radikalisme di Kota Bandung dan Surabaya yang menyasar Pemerintah Daerah, ormas keagamaan, serta organisasi masyarakat sipil (OMS). Selain melakukan penelitian dan pemetaan di lapangan, INFID bersama PW Fatayat NU Jawa Barat dan Jawa Timur juga intensif mengadakan dialog rutin dengan para pemangku kepentingan di wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur melalui komunikasi secara online, maupun webinar sebagai sarana dan ruang komunikasi untuk berbagi pengetahuan bersama mengenai penanganan dan pendampingan deportan dan returni perempuan dan anak dengan pendekatan komprehensif, berdasarkan prinsip HAM, kesetaraan gender dan berperspektif anak.

Inisiatif program deradikalisasi INFID ini berdampak pada; 1) meningkatnya pengetahuan OMS, Pemda, dan ormas keagamaan mengenai peta masalah radikalisme dan strategi reintegrasi; dan 2) menguatnya kerja sama antara ketiga lembaga tersebut dalam menangani deportan dan returni perempuan dan anak korban radikalisme.

B. Program Penurunan Ketimpangan

Setelah memperjuangkan akses pemuda dan perempuan dalam ketenagakerjaan melalui program vokasi pada 2019, fokus utama program Penurunan Ketimpangan di 2020 adalah pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dan advokasi implementasi UU Perkawinan No. 1 tahun 2019 tentang pembatasan usia perkawinan anak.

Batalnya pengesahan RUU P-KS pada masa sidang DPR 2014-2019 menyebabkan proses advokasinya harus mulai dari awal, baik di level pemerintah maupun di DPR RI. Upaya koalisi masyarakat sipil untuk mendorong pengesahan RUU P-KS pun terpaksa memasuki masa vakum, khususnya setelah akhir masa sidang DPR 2014-2019. Geliat gerakan kembali muncul menjelang penetapan prolegnas prioritas 2020, untuk menentukan rancangan undang-undang mana yang akan diprioritaskan untuk dibahas pada masa sidang DPR 2020. Pada 17 Januari 2020, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui 50 Rancangan Undang-undang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020, di mana salah satunya adalah Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS). Hal ini menimbulkan harapan baru bagi organisasi yang mendorong advokasi RUU P-KS.

Sayangnya, pada akhir Februari dan awal Maret 2020, dunia memasuki situasi baru yang tidak terprediksi sebelumnya, yaitu merebaknya pandemi COVID-19. Pandemi ini mengubah seluruh tatanan kehidupan, serta menyita seluruh perhatian masyarakat, pemerintah serta DPR. Realokasi anggaran dilakukan untuk mengantisipasi dampak pandemi. Pembahasan peraturan perundang-undangan di DPR tidak dianggap prioritas, ditunda atau bahkan tidak dibahas sama sekali. Hal ini berdampak juga terhadap pembahasan RUU P-KS di DPR. Hingga pertengahan Mei 2020, pembahasannya belum dijadwalkan sama sekali. Padahal di sisi lain, adanya pandemi berkontribusi kepada peningkatan kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan seksual.

Sementara itu, untuk isu perkawinan usia anak, hingga pertengahan Mei 2020 belum terlihat adanya pembahasan yang lebih mendalam tentang upaya amandemen Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975, sebagai aturan turunan dari UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 (yang telah direvisi menjadi UU Perkawinan No. 16/2019 pada September 2019). Diskusi terkait rencana pembahasan PP turunan dari revisi UU Perkawinan sudah beberapa kali dilakukan antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama organisasi masyarakat sipil. Keberadaan PP ini diharapkan akan memperkuat keberadaan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin. Sejak COVID-19 melanda Indonesia, pembahasannya ikut tertunda, meskipun data di lapangan menunjukkan jumlah dispensasi perkawinan anak meningkat selama pandemi.

Peran dan Kontribusi INFID

Dalam rangka mendorong pengesahan RUU P-KS, INFID turut bergabung ke dalam tim kampanye dan tim substansi jaringan masyarakat sipil. Strategi yang digunakan oleh INFID dan koalisi masyarakat sipil adalah memaksimalkan kampanye untuk mengedukasi publik tentang relevansi RUU P-KS, khususnya di masa pandemi. Era pandemi yang memaksa masyarakat untuk *go digital*, menggerakkan inisiatif INFID untuk membuka ruang diskusi dan meningkatkan kesadaran dalam bentuk webinar terkait dampak pandemi COVID-19 terhadap perempuan, khususnya kekerasan terhadap perempuan. Kampanye sosial media pun dilakukan untuk menunjukkan relevansi isu tersebut di masa pandemi. INFID secara rutin menyusun *weekly insight* berupa infografis di media sosial

Sejak RUU P-KS masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020 pada pertengahan Januari 2020, belum terlihat kemajuan advokasinya di DPR. Meskipun demikian, beberapa kegiatan telah dilakukan INFID dalam kerangka dialog kebijakan. Mulai dari menginisiasi pertemuan konsolidasi masyarakat sipil untuk menyusun rencana kampanye dan strategi advokasi bersama untuk mendorong pembahasan RUU P-KS di DPR, audiensi ke Komnas Perempuan untuk mendiskusikan perkembangan RUU P-KS, hingga menyelenggarakan *webinar series* “Perempuan dan COVID-19” melalui *platform* Zoom dan Youtube. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengangkat dampak pandemi COVID-19 terhadap isu gender, termasuk isu kekerasan terhadap perempuan, bantuan sosial untuk kelompok rentan, dan perkawinan anak.

INFID juga aktif menghasilkan publikasi ilmiah dalam isu kesetaraan gender. INFID menyelesaikan studi kualitatif dan kuantitatif tentang RUU P-KS dan pembatasan usia kawin pada anak yang telah dipresentasikan ke Baleg DPR RI dan Kantor Staf Presiden (KSP) untuk mengadvokasi pengesahan RUU P-KS kepada pemerintah. Selain menghasilkan dua studi, INFID turut menyusun Kertas Kebijakan “**Urgensi Kerangka Kerja Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di Indonesia**” dan “**Urgensi Kebijakan dan Implementasi Penurunan Perkawinan Anak dan Perkawinan Dini dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender di Indonesia**”.

Pada Juli-Desember 2020, INFID menyebarluaskan petisi online melalui *platform change.org* mengenai dukungan atas pengesahan RUU P-KS. Dari target 250,000 tanda tangan, petisi ini hanya mendapatkan 32,193 tanda tangan. Hal ini tidak terlepas dari adanya petisi daring yang sudah diunggah terlebih dahulu oleh organisasi masyarakat sipil sejak 2016 atas desakan yang sama, yaitu pengesahan RUU P-KS dan sudah mendapatkan 341,679 tanda tangan. Meski demikian, kontribusi INFID tidak hanya berupa petisi, namun juga dilakukan dengan mengirimkan secara rutin kepada pelanggan *change.org* fakta-fakta dan data terkini tentang upaya penghapusan kekerasan seksual di Indonesia.

Selain petisi, INFID juga mempublikasikan sebuah surat terbuka untuk mendorong percepatan pengesahan RUU-PKS di dua media cetak besar di Indonesia, yaitu Koran Tempo pada 16 Juli 2020 dengan 127 tanda tangan, dan Koran Kompas pada edisi 20 Juli 2020 dengan 128 tanda tangan dukungan. Advokasi juga dilanjutkan dengan acara virtual bersama 86 tokoh yang turut menandatangani surat terbuka dan menyampaikan desakan mereka terhadap pengesahan RUU P-KS. Deputi Kantor Staf Presiden (KSP) hadir dalam acara tersebut dan menyampaikan apresiasinya atas advokasi lantang INFID melalui surat terbuka ini.

Pada peringatan *International Women Day* (IWD) 2020, INFID bergabung dengan koalisi GERAK PEREMPUAN untuk mengadakan aksi simbolik. Dalam koalisi tersebut, INFID bergabung di tim kampanye dan kegiatan peringatan IWD Tahun 2020 turut diikuti oleh peserta sebanyak kurang lebih 6.000 orang. Selain itu, INFID bersama dengan GERAK PEREMPUAN turut terlibat dalam “Aksi Selasaan”, yakni aksi simbolik yang dilakukan setiap hari selasa di depan Gedung DPR RI untuk mendukung percepatan pengesahan RUU P-KS pasca dikeluarkannya RUU P-KS dari Prolegnas Prioritas.

C. Program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

2020 menjadi tahun yang sulit tidak hanya bagi Indonesia, namun bagi seluruh dunia. Memori pahit harus dialami masyarakat dunia dengan berbagai kabar duka akibat kehilangan keluarga dan orang terdekat, bahkan merasakan dampak ekonomi, fisik, dan psikis dari virus COVID-19. Di Indonesia, akumulasi kasus positif COVID-19 sepanjang 2020 berjumlah 743.198 kasus, dengan jumlah kesembuhan 611.097 dan kematian mencapai 22.138².

Pandemi COVID-19 juga menghantam berbagai aspek tujuan pembangunan berkelanjutan. Dari sektor kesehatan, layanan kesehatan Indonesia tumbang seiring dengan lonjakan masiv pasien COVID-19. Data dari Kementerian Kesehatan, sebanyak 83,9 persen pelayanan kesehatan dasar, khususnya Posyandu, tidak bisa berjalan dengan optimal selama pandemi COVID-19. Pelayanan kesehatan nasional yang ambruk oleh hantaman pandemi ini mengakibatkan 25 juta balita tidak memperoleh imunisasi, suplementasi vitamin A, pemantauan tumbuh kembang, dan pelayanan rutin penting lainnya. Pandemi juga sangat berdampak pada Ibu hamil, karena menyebabkan sulitnya akses pelayanan antenatal yang memadai.

Dari sektor ekonomi, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah menyebutkan bahwa pandemi menyumbang kenaikan jumlah pengangguran menjadi 9,7 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka mencapai 7,07 persen di Indonesia³. Penundaan dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) pun tidak dapat dihindari, karena pemerintah mengarahkan fokus agenda nasional pada penanganan pandemi.

2 Selengkapnya “Tutup 2020, Positif Covid-19 di RI 743.198, Meninggal 22.138” selengkapnya di sini: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210101081932-20-588397/tutup-2020-positif-covid-19-di-ri-743198-meninggal-22138>.

3 Selengkapnya <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4416534/menaker-jumlah-pengangguran-naik-jadi-97-juta-orang-akibat-pandemi-covid-19>

Sebelum COVID-19 melanda, banyak yang meragukan apakah semua tujuan dapat tercapai pada 2030 seperti yang ditargetkan ketika SDGs diluncurkan pada September 2015. *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN-ESCAP)* bahkan mengatakan bahwa kawasan Asia Pasifik tidak berada di jalur pencapaian SDGs, ada kemajuan tetapi dengan kecepatan yang lambat, menjadi mandek atau bahkan bergerak ke arah yang berlawanan.

Di Indonesia contohnya, tidak semua provinsi memiliki Rencana Aksi Daerah (RAD) untuk memenuhi SDGs. Padahal, hal ini sudah menjadi amanat dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 tahun 2017 yang menyatakan bahwa setiap Gubernur menyusun RAD SDGs bersama Bupati/Walikota paling lambat Juli 2018 di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan multipihak. Pada kondisi di tingkat nasional, beberapa target SDGs bahkan belum ditetapkan, apalagi memasukkannya ke dalam rencana pembangunan jangka menengah dan panjang.

Pandemi COVID-19 menjadi disrupsi yang akut dalam upaya pemerintah pusat dan daerah untuk melaksanakan dan mencapai target SDGs. Hampir semua tujuan terpengaruh secara langsung maupun tidak langsung, terlebih setiap tujuan tidak berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan satu sama lain. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan menyatakan bahwa upaya pencapaian SDGs menjadi lebih menantang akibat hantaman krisis COVID-19.

Peran dan Kontribusi INFID

INFID aktif mendorong Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengadopsi prinsip *Open Government Partnership (OGP)* atau pemerintahan terbuka dan mempromosikan praktik baik di tingkat lokal. Sebagai perwujudan komitmen, INFID ikut berperan aktif dalam merumuskan Rencana Aksi 2020-2022 yang mendorong pelaksanaan kegiatan pemerintahan terbuka, seperti transparan, inovatif, inklusif, melibatkan partisipasi masyarakat, berkelanjutan, serta akuntabel. INFID juga melakukan pendampingan dan mendorong sejumlah daerah untuk berpartisipasi dalam OGP Lokal, di antaranya adalah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dan Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

Kontribusi INFID dalam pendampingan ini dilakukan melalui beberapa proses, seperti pengumpulan *Expression of Interest* dan penyusunan *Letter of Support* untuk memperkuat substansi sehingga membuka peluang lebih besar bagi daerah yang ikut mendaftar program OGP Lokal agar lolos seleksi di level internasional. Dari 56 Pemerintah Daerah di seluruh dunia yang terpilih, Kabupaten Banggai berhasil menjadi satu dari empat daerah yang terpilih dari Indonesia. Selain itu, INFID juga aktif berkegiatan untuk mendorong terwujudnya nilai-nilai OGP dalam merespon penanganan COVID-19 di Indonesia.

Kinerja INFID juga semakin gencar dalam mengawal peningkatan pembangunan dalam bidang kesehatan. Terlebih, 2020 menjadi tahun yang sulit bagi sektor kesehatan dunia karena menjadi periode awal penyebaran virus COVID-19. INFID mengawal Pemerintah Daerah di enam kabupaten dan kota dalam melakukan evaluasi dan meningkatkan tata kelola, kinerja,

dan pelayanan kesehatan selama pandemi. Enam daerah tersebut tersebar di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Kabupaten Tangerang, Makassar, Semarang, Padang, dan Malang.

Tidak berhenti pada pengawasan pelayanan dan infrastruktur kesehatan, INFID juga turut melakukan upaya respon penanganan pandemi COVID-19. INFID menjadi koordinator dari koalisi 15 lembaga masyarakat sipil dengan nama *Coalition of Vulnerable Group and Affected Communities in Pandemic Era of COVID-19* atau Koalisi Masyarakat Terdampak. Koalisi ini dibentuk untuk melakukan kegiatan respon penanganan bencana, termasuk memastikan dana bantuan pandemi disalurkan secara tepat tanpa penyelewengan. Selama enam bulan, koalisi ini berhasil melakukan kegiatan respon penanganan bencana pandemi seperti, mendorong alokasi signifikan anggaran Desa Grujungan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah untuk internet pendidikan, bantuan UMKM Desa dan pelatihan ekonomi produktif, serta sosialisasi pencegahan penyebaran COVID-19. Ada pula pendampingan psikologis bagi 44 perempuan yang mengalami KDRT karena pembatasan sosial di Kabupaten Deli Serdang. Koalisi juga mengeluarkan petisi daring yang berhasil mengumpulkan 21.139 dukungan dengan judul **“Kelompok Rentan Kurang diperhatikan: Ubah Mekanisme dan Perbarui Data Penerima COVID-19”**. Bukti-bukti dan testimoni pada petisi ini ditindaklanjuti pemerintah dengan mengubah program bantuan sosial dari sembako menjadi bantuan sosial tunai yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan Menteri Sosial Tri Rismaharini pada 4 Januari 2021.

INFID juga terus memantau, mengawal, dan meneriakkan rekomendasi-rekomendasi untuk memastikan penanganan pandemi COVID-19 oleh pemerintah berjalan dengan baik dan berkeadilan. INFID melakukan survei warga dan lembaga organisasi masyarakat sipil pada periode September-Oktober 2020 dengan responden mencapai 2.201 orang yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi layanan pemerintah selama pandemi, termasuk dalam hal penyediaan informasi, layanan kesehatan, hingga bantuan sosial.

Terdapat lima butir rekomendasi yang dicatat oleh INFID berdasarkan temuan-temuan di lapangan. Pertama, INFID menghimbau pelibatan warga dan aktor-aktor non negara dalam menggerakkan RT/RW, komunitas, Puskesmas, juga dalam mengawasi proses isolasi mandiri (isoman), memverifikasi data penerima bantuan sosial, distribusi bantuan sosial, dan penguatan ekonomi masyarakat. Kedua, INFID mendorong agar pemerintah pusat memberikan dukungan dan penguatan untuk pemerintah daerah. Ketiga, INFID menyuarakan perlunya inovasi-inovasi dalam proses distribusi bantuan sosial ke tengah masyarakat, agar seluruh target pembagian dilakukan dengan tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat rentan. Keempat, INFID meyakini perlu adanya partisipasi yang lebih besar dari organisasi masyarakat sipil (OMS) dalam mengawasi belanja/pembelian barang-barang publik oleh pemerintah melalui kemitraan bersama masyarakat sipil. Kelima, INFID mendorong adanya dukungan pemerintah untuk pemulihan ekonomi OMS dengan menciptakan skema bisnis melalui kolaborasi antara OMS, Kementerian dan Lembaga, serta sektor swasta.



BAB 3: INFID DALAM MEDIA

Media Massa

Media bukan hanya menjadi alat kampanye, melainkan juga sebuah eksistensi. Kedekatan sebuah lembaga dengan media akan menciptakan kesempatan yang lebih besar bagi lembaga untuk menyampaikan pesannya kepada publik dan pemangku kebijakan.

INFID sangat menyadari posisi media dalam gerakan. Di tengah situasi sulit akibat pandemi, liputan media terhadap program-program yang dilaksanakan INFID justru mengalami peningkatan.

Media yang banyak meliput kegiatan INFID antara lain Antara News, Surabaya Tribunnews, Kompas.com, Gatra.com, Jatim Times, Tempo.co, Fakta Jember, dan CNN Indonesia, NU Online, MDN News, Harian Suara, Harian Nasional, Islam.co, Warta Batavia. Kegiatan yang diliput biasanya terkait dengan konferensi pers, media, rilis di mitra, dan kampanye program.

Dari tiga program INFID, program HAM dan Demokrasi mendapatkan liputan terbanyak, yaitu 90 liputan (sekitar 44 persen dari total peliputan media mengenai INFID) yang didominasi dari peliputan media pada acara Festival HAM 2020. Sementara itu, program SDGs mendapatkan 69 liputan media dan program Penurunan Ketimpangan mencatatkan 44 pemberitaan media.

Media Sosial

Tidak bisa dipungkiri bahwa media sosial adalah wadah berbagi informasi dan kampanye yang sangat berpengaruh. Durasi penggunaan media sosial oleh masyarakat pada tahun 2020 bahkan sudah jauh melampaui durasi mengakses televisi. Rata-rata waktu menggunakan internet per hari mencapai 7 jam 59 menit, sementara masyarakat hanya menggunakan televisi rata-rata selama 3 jam 4 menit dalam sehari⁴.

Setidaknya terdapat empat *platform* media sosial dengan jumlah pengguna terbanyak di Indonesia. Pada 2020, data Hootsuite mencatat YouTube memiliki pengguna hingga 88% dari populasi Indonesia, Whatsapp 84%, Facebook 82%, dan Instagram 79%. Apabila dikembangkan dengan serius, *platform* ini sangat berpotensi untuk menghasilkan dukungan pengetahuan dan jaringan gerakan yang luas, di level nasional dan daerah, khususnya menjangkau generasi muda sebagai pengguna media sosial yang terbesar.

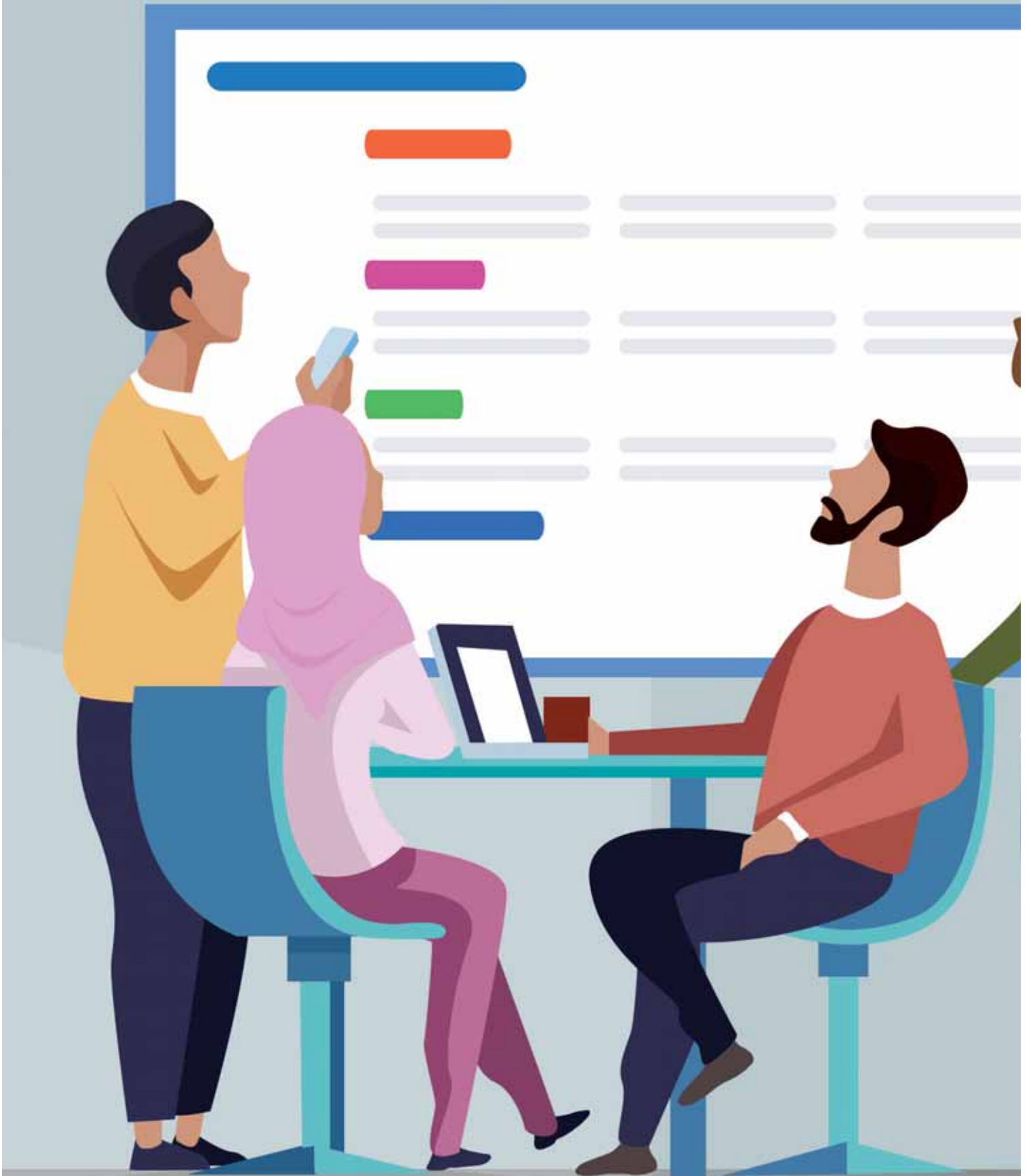
INFID sebagai organisasi dengan jaringan nasional dan internasional yang luas dan ingin mempengaruhi kebijakan lokal, nasional, dan internasional, menaruh perhatian yang besar pada penggunaan media sosial. INFID menggunakan Youtube, Instagram, Twitter, Facebook, serta jejaring Whatsapp melalui Divisi *Partnership* dan *Membership* sebagai salah satu upaya kampanye dan komunikasi publik.

Pengikut INFID di seluruh media sosial bertambah sepanjang 2020. Hampir 900 akun menjadi pengikut baru Instagram INFID (*infid_id*) dari 2,334 *followers* (2019) menjadi 3,223 *followers* di 2020. Sementara untuk Twitter, mengalami pertumbuhan yang agak lambat dalam setahun dengan hanya mendapatkan 213 pengikut baru. Maka, total *followers* Twitter *@infid_id* menjadi 4,061 pada 2020. Jumlah *likes* di Facebook juga bertambah, meskipun angkanya terpaut tipis dari 2019 dengan 7,177 *likes* menjadi 7,210 *likes* di 2020 (naik 0,46 persen).

Di era pandemi, jumlah produksi video untuk *channel* INFID TV di YouTube naik dari 76 video di 2019 menjadi 135 video di 2020. Hal ini tidak terlepas dari efek pandemi yang memaksa hampir seluruh kegiatan dilakukan secara virtual, sehingga pemanfaatan kanal Youtube INFID TV pun mengalami peningkatan. Meski demikian, video yang diunggah masih didominasi kegiatan webinar, belum menjangkau produksi video *in-house* seperti *podcast* dari internal INFID atau videografis yang mengangkat isu-isu yang diperjuangkan INFID.

Jumlah subscriber sudah mengalami peningkatan hampir 70 persen dari 237 *subscribers* pada 2019 menjadi 781 *subscribers*. Jumlah produksi video dan subscriber masih terhitung sedikit, meskipun terdapat peningkatan yang cukup signifikan. Sebuah kanal video di YouTube, agar bisa dapat monetisasi, kanal tersebut setidaknya memiliki 1.000 *subscribers*. Sebagai media untuk kampanye dan advokasi, keadaan ini terasa belum efektif.

4 Selengkapnya <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2020/>





BAB 4: INFID DI TENGAH MASYARAKAT

A. Dampak Nyata Kerja INFID

Hilir dari setiap kegiatan INFID adalah terjadinya perubahan yang baik di tengah masyarakat. Maka, selain hasil-hasil dari kegiatan, manfaat nyata yang diterima oleh masyarakat juga menjadi indikator keberhasilan kerja-kerja INFID. Berikut ini adalah dampak nyata di lapangan yang telah INFID catat dari berbagai kegiatan yang dilakukan sepanjang 2020.

Dari program tujuan pembangunan berkelanjutan, kegiatan INFID memberikan dampak capaian yang cukup signifikan kepada penanganan COVID-19 bagi kelompok rentan. Di antaranya adalah sebagai berikut.

Petisi daring INFID melalui [change.org](https://www.change.org) mengenai perbaikan data penerima dan mekanisme penyaluran bantuan sosial COVID-19 mendapatkan dukungan dari 21.139 warga. Angka ini melampaui target dukungan, yaitu 10.000 dukungan. Kampanye online ini juga menjadi bahan advokasi dan kampanye, karena terdapat testimoni dan laporan warga mengenai implementasi bantuan sosial COVID-19. Bukti-bukti dan testimoni pada petisi ini setidaknya mengubah program bantuan sosial dari sembako menjadi bantuan sosial tunai yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dan Menteri Sosial Tri Rismaharini pada 4 Januari 2021

Kegiatan INFID bersama koalisi juga menciptakan alokasi yang signifikan dari anggaran Desa Grujugan, Kebumen, Jawa Tengah sebesar Rp. 388.101.000 untuk penanganan COVID-19. Anggaran tersebut di antaranya diperuntukan untuk melakukan kampanye protokol kesehatan dan membentuk relawan Desa

Aman COVID-19, serta sebagai cadangan Bantuan Langsung Tunai Dana dengan total pagu anggaran Rp. 110.500.000. Selain itu, ada juga anggaran kegiatan khusus penyuluhan COVID-19 sebesar Rp. 5.000.000. Untuk sektor pendidikan, terdapat program pengembangan sarana internet desa yang dikhususkan bagi guru/orang tua didik pada jenjang SD, SMP, dan SMA, serta membantu promosi pengembangan usaha bagi pelaku UMKM yang sudah memanfaatkan internet dengan total pagu anggaran Rp.15.000.000. Selanjutnya, beasiswa untuk pelajar tidak mampu dengan pagu anggaran Rp. 5.000.000. Untuk membantu pelaku UMKM terdampak, sejumlah kegiatan dilakukan oleh Pemerintah setempat, di antaranya penambahan penyertaan modal, memfasilitasi tunda jual barang kerajinan, serta pelatihan ekonomi produktif kerajinan bambu dan industri rumah tangga dengan total pagu anggaran Rp. 252.601.000,-.

Dorongan INFID semakin menguatkan rencana pemerintah untuk memberikan dukungan agar peran organisasi masyarakat sipil (OMS) tetap kuat dan berlanjut melalui pembentukan kelembagaan komisi masyarakat sipil. INFID telah menyusun riset keadaan OMS dalam menghadapi pandemi COVID-19 sebagai bukti kondisi OMS di Indonesia.

INFID bersama Koalisi Masyarakat Terdampak juga melakukan pendampingan psikologis terhadap kelompok rentan, yaitu perempuan dan orang tua/pendidik. Mereka adalah korban kekerasan rumah tangga selama pandemi COVID-19 dan orang tua serta pendidik yang mengalami masalah pendidikan jarak jauh (PJJ).

Dari isu ketimpangan gender dan sosial, dampak nyata di tengah masyarakat yang terlihat melalui kerja-kerja INFID adalah sebagai berikut.

Kegiatan advokasi INFID berhasil menjangkau 160,698 peserta dan penonton dari seluruh Indonesia. Kegiatan INFID juga menghasilkan dua kertas kerja yang bisa diakses dan dipelajari secara gratis oleh publik terkait isu gender dan penghapusan kekerasan seksual.

Isu kesetaraan gender di Indonesia semakin lantang disuarakan dan menjadi diskursus yang mendapat dukungan positif oleh publik di Indonesia. INFID terus mengalami kemajuan dalam memahami peta advokasi dan gerakan kesetaraan gender di Indonesia, khususnya untuk mendorong RUU P-KS dan penghentian perkawinan anak. Hal ini terlihat dari sejumlah capaian antara lain: 1) Semakin memahami peta negosiasi di DPR RI untuk memantau perkembangan status RUU P-KS; 2) Kerja sama yang semakin menguat antara INFID dan para pemangku kepentingan dalam isu gender, seperti dengan Komnas Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk RUU P-KS dalam hal penghapusan kekerasan seksual dan penghentian perkawinan anak.

Sementara itu dari program HAM & Demokrasi, dampak nyata di masyarakat yang kami himpun adalah sebagai berikut.

Terbitnya “Deklarasi Banjarmasin untuk Indonesia untuk Indonesia yang Lebih Sehat dan Inklusif” sebagai hasil dari Festival HAM 2020. Deklarasi ini memuat enam poin penting yang mendorong peran aktif daerah untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan HAM, baik di kala pandemi, maupun masa pemulihan dan setelahnya, kepada seluruh warga, terutama kelompok rentan.

Terjadi penguatan rasa toleransi atas keberagaman dan mencegah ekstremisme berbasis agama di daerah tempat wilayah kerja INFID, antara lain di Salatiga - Jawa Tengah, Semarang - Jawa Tengah, Wonosobo - Jawa Tengah, Bojonegoro - Jawa Timur, Lampung Timur - Lampung, Serdang Bedagai - Sumatera Utara, dan Pakpak Bharat - Sumatera Utara.

Pada tingkat kebijakan, INFID berhasil mendorong agar Pemerintah RI melalui Kementerian Hukum dan HAM dan BAPPENAS untuk mensinergikan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2020-2024, agar memastikan pelaksanaan UNGPs sejalan dengan adaptasi perubahan iklim di Indonesia dengan berbasis gender.

B. Inovasi Program

Pandemi COVID-19 membuat INFID berpikir kreatif untuk terus berkampanye dan mengawal isu dengan mengedepankan protokol kesehatan. Pada akhirnya, INFID menyiasati dampak pandemi dengan melakukan transisi digital dalam kegiatan advokasi, konsultasi, penelitian, hingga seminar.

Untuk pertama kalinya, INFID melaksanakan Festival HAM 2020 dengan metode *hybrid* selama tiga hari, yaitu dilaksanakan secara luring di kota Banjarmasin, Kalimantan Tengah dan daring melalui *platform* Zoom. Dengan mentaati aturan protokol kesehatan yang ketat, festival ini diisi dengan kegiatan konferensi yang terdiri dari empat rapat pleno, delapan pertemuan paralel, dan *side events* dengan total 93 orang narasumber. Meskipun di tengah pandemi, acara ini tetap dimeriahkan dengan pertunjukkan musik dan pameran yang dilakukan secara virtual. Situasi pandemi tidak menyurutkan antusiasme sekitar 1.000 peserta yang hadir dari berbagai kabupaten/kota di Indonesia dan negara lain, termasuk Korea Selatan, Belanda, Thailand, Taiwan, Hongkong, India, Denmark, dan Amerika Serikat.

INFID juga melakukan kampanye daring sebagai bentuk intervensi atas narasi intoleran dan ekstremis yang semakin meluas di internet dan media sosial. Melalui kampanye ini, sebanyak 25 artikel, enam video, 25 infografis, tiga kegiatan Instagram Live, dan empat *thread* telah diproduksi dan ditampilkan di media online. Sepanjang 2020, total jangkauan kampanye online mencapai 3.407.827 *view* dan 363.009 *engagement*.

LAMPIRAN I

Daftar kegiatan INFID semua program

No	Kegiatan	Tanggal
1	Pertemuan dengan Fatayat NU Jabar dan Jatim	29 Juni 2020
2	Pertemuan Forum Komunikasi Dialog Multi Pihak 1 Jabar	25 Agustus 2020
3	Pertemuan Forum Komunikasi Dialog Multi Pihak 1 Jatim	26 Agustus 2020
4	Seminar Penyampaian Hasil Riset “Pemetaan Penanganan dan Pendampingan Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak di Jawa Barat dan Jawa Timur”	24 September 2020
5	Lokakarya Tindak Lanjut Hasil Riset “Pemetaan Penanganan dan Pendampingan Deportasi dan Returni Perempuan dan Anak di Jawa Barat dan Jawa Timur”	25 September 2020
6	<i>Rehabilitation and Reintegration Policy in Bandung and Surabaya: Research Findings Presentation</i>	5 November 2020
7	Webinar “Peran Perempuan dalam Radikalisme: Korban atau Pelaku, Aktor atau Pendukung”	30 Desember 2020
8	Audiensi dengan KSP Riset PTN untuk penyampaian hasil riset tentang “Derajat Radikalisme pada Masjid Kampus di Sepuluh Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia”	10 Januari 2020
9	Audiensi dengan KemenkoPMK Penyampaian 3 Hasil Riset; 1) “Peran Organisasi Islam Moderat dalam menangkal Ekstremisme Kekerasan: Studi Kasus Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah” , 2) “Derajat Radikalisme pada Masjid Kampus di Sepuluh Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia” , dan 3) “Dampak Dinamika Regional terkait Ekstremisme Kekerasan pada Komunitas Islam di Indonesia”	21 Januari 2020
10	Workshop Program PREVENT dengan Mitra kerja di Yogyakarta	30 - 31 Januari 2020
11	Diskusi & Bedah Buku “The Illusion of an Islamic State”	12 Mei 2020
12	Diskusi Daring: Covid-19, Anak Muda dan Agama	19 Mei 2020
13	Diseminasi hasil riset tentang “Pemetaan Program Pencegahan Ekstremisme-Kekerasan oleh Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Indonesia (2014-2019)”	20 Juli 2020
13	Pelatihan Ulama Muda	3, 5, 6, 10, 11, 18 Agustus
14	Lokalahir Kabupaten/Kota HAM 2020 di sejumlah daerah di Indonesia	22 Sep - 1 Okt
15	Festival HAM 2020	17-19 Desember 2020
16	Webinar Reformasi Kesehatan dan Pencapaian SDGs dalam Situasi Pandemi	3 Juni 2020
17	Webinar diseminasi publik Penilaian Cepat Penanganan COVID-19 di Tiga Kota (Makassar, Padang dan Yogyakarta)	17 Juli 2020
18	Mengunggah petisi daring “Kelompok Rentan Kurang diperhatikan: Ubah Mekanisme dan Perbarui Data Penerima COVID-19” di change.org.	Juni 2020
19	Mengunggah petisi daring “Karyawan Swasta Sudah Terima Bansos, Bagaimana Nasib Pekerja Informal ?” di change.org	September 2020
20	Mengunggah petisi daring “Menteri Sosial Jadi Tersangka : Ganti Bansos Sembako Jadi Bantuan Langsung Tunai di 2021” di change.org	Desember 2020
21	Media Briefing “Kebijakan dan Aturan Hukum Pencegahan, Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual dalam Pemenuhan Hak Perempuan di Aceh”	22 Desember 2020

No	Kegiatan	Tanggal
22	Media Briefing “Peluncuran Hasil Studi Kualitatif dan Kuantitatif tentang Kesetaraan Gender: Persepsi dan Dukungan Stakeholder, serta Respons Masyarakat terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual”	25 November 2020
23	Konferensi Pers Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Advokasi Ruu Penghapusan Kekerasan Seksual	1 Oktober 2020
24	Media Briefing untuk Mendorong Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Percepatan Pencapaian Kesetaraan Gender di Indonesia	6 Maret 2020
25	Orasi Bersama Pernyataan Sikap Dukungan Percepatan Pembahasan dan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS)	20 Juli 2020
26	Audiensi Hasil Studi dengan Kantor Staf Presiden atas penelitian terbaru INFID; (1) Studi kualitatif tentang “Persepsi dan Dukungan Pemangku Kepentingan Terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Perkawinan” ; (2) Studi Kuantitatif berjudul “Respons dan Sikap Masyarakat Terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan”	4 November 2020
27	Berpartisipasi dalam <i>World Human Rights Cities Forum</i> (WHRCF) 2020 dalam sesi <i>Indonesian Human Rights Cities</i>	9 Oktober 2020

LAMPIRAN II

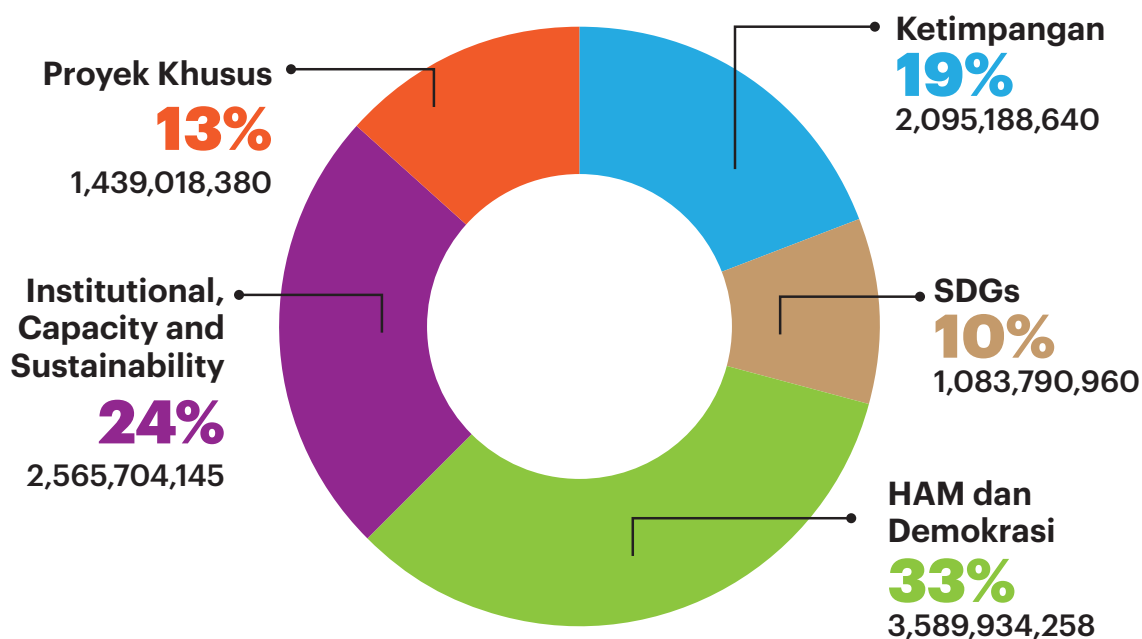
Daftar Selektif Publikasi semua program

No	Tanggal Publikasi	Judul Publikasi
1	22 Desember 2020	<i>The Degree Of Radicalism In Campus Mosques In 10 State Universities In Indonesia</i>
2	10 Desember 2020	Laporan Studi Kualitatif Persepsi dan Dukungan Pemangku Kepentingan Terhadap RUU PKS
3	10 Desember 2020	Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender Respons dan Sikap Masyarakat terhadap RUU PKS
4	31 Maret 2020	Laporan Pemetaan Program Pencegahan Ekstremisme
5	2 Maret 2020	Kertas Kebijakan INFID 2020 “RUU Penghapusan Kekerasan Seksual: Jalan Keadilan Bagi Korban”
6	26 Februari 2020	Paper INFID – Bagaimana Menciptakan Lingkungan Kerja yang Setara?
7	20 Oktober 2020	Dukungan Kemendagri bagi Kerjasama LSM dan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19
8	21 Juli 2020	<i>Open Letter In Support Of The Fast Tracking Of The Discussion And Passage Of The Bill On The Elimination Of Sexual Violence</i>
9	17 Juli 2020	<i>Realising the potential of Goal 16 of the 2030 Agenda to promote and protect Civic Space</i>
10	20 Januari 2020	Panduan Kemitraan Multipihak untuk Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia
11	6 Januari 2020	Panduan Monev bagi Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) di Daerah

LAMPIRAN III

Laporan Keuangan

Biaya per Program





LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. LAI.00004/3.0258/AU.2/11/0844-2/1/I/2022

Kepada Yth.
Manajemen International NGO Forum on
Indonesian Development (INFID)
Jakarta Selatan

Kami telah mengaudit laporan keuangan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2020, serta laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

No. IAR.00004/3.0258/AU.2/11/0844-2/1/I/2022

To.
Management of International NGO Forum on
Indonesian Development (INFID)
South Jakarta

We have audited the accompanying financial statements of International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2020, and comprehensive income statement, changes in net assets, and statement of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards for Non-Publicly Accountable Entities, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's responsibility

Our responsibility is to express an opinion on such financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.



Tanggung jawab auditor (Lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) tanggal 31 Desember 2020, serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia.

Auditor's responsibility (Continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) as of December 31, 2020 and its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards for Non-Publicly Accountable Entities.

KAP. S. MANNAN, ARDIANSYAH DAN REKAN
KANTOR AKUNTAN PUBLIK/
PUBLIC ACCOUNTANT FIRM
NIU-KAP / Office License : KEP 1430/KM.1/2012



Dr. M. Ardiansyah Syam, CPA., CPI
Rekan / Partner

NIAP / Public Accountant License No. AP 0844
Jakarta, 25 Januari 2022/ January 25, 2022

LAPORAN KEUANGAN /
FINANCIAL STATEMENTS

INTERNATIONAL NGO FORUM ON
INDONESIAN DEVELOPMENT (INFID)
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2020 dan 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

INTERNATIONAL NGO FORUM ON
INDONESIAN DEVELOPMENT (INFID)
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2020 and 2019
(In Rupiah, unless otherwise stated)

URAIAN	2020	Catatan / Notes	2019	DESCRIPTIONS
ASET				ASSETS
Aset Lancar				Current Assets
Kas dan setara kas	4.699.790.514	2a,2c, 3	3.487.480.813	Cash and cash equivalent
Piutang lain - lain	731.702.500	2a,2d, 4	667.103.826	Others account receivable
Uang muka	198.522.200	2a,2e, 5	238.359.583	Advances
Biaya dibayar dimuka	17.424.972	2a,2e, 6	12.199.935	Prepaid expenses
Total Aset Lancar	5.647.440.186		4.405.144.157	Total Current Assets
Aset Tidak Lancar				Non Current Assets
Investasi	298.057.370	2a, 7	-	Investment
Aset tetap - nilai buku	434.514.208	2a,2f, 8	513.420.215	Fixed assets - book value
Total Aset Tidak Lancar	732.571.578		513.420.215	Total Non Current Assets
Total Aset	6.380.011.764		4.918.564.372	Total Assets
LIABILITAS				LIABILITIES
Liabilitas jangka pendek				Current liabilities
Biaya yang masih harus dibayar	2.275.406.953	2a,2g, 9	1.167.048.661	Accrued expenses
Utang pajak	32.144.723	2a,2i, 10	63.822.462	Tax payable
Titipan dana	298.057.370	2a,2h, 11	-	Reserved funds
Total Liabilitas Jangka Pendek	2.605.609.046		1.230.871.123	Total Current Liabilities
Total Liabilitas	2.605.609.046		1.230.871.123	Total Liabilities
ASET NETO				NET ASSETS
Aset neto akhir tahun		2a,2j, 12		Net assets end of year
- Dengan pembatasan	2.736.291.683		2.298.979.156	With restrictions -
- Tanpa pembatasan	1.038.111.036		1.388.714.093	Without restrictions -
Total Aset Neto	3.774.402.719		3.687.693.249	Total Net Assets
Total Utang dan Aset Neto	6.380.011.764		4.918.564.372	Total Liabilities and Net Assets

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See notes to statement receipts and expenditures that accompanying from this financial statement

INTERNATIONAL NGO FORUM ON INDONESIAN DEVELOPMENT (INFID)
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

INTERNATIONAL NGO FORUM ON INDONESIAN DEVELOPMENT (INFID)
COMPREHENSIVE INCOME STATEMENT
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2020 AND 2019

(In IDR, unless otherwise stated)

URAIAN	2020			Catatan / Notes	2019			DESCRIPTIONS
	Dengan Pembatasan / With Restrictions	Tanpa Pembatasan / Without Restrictions	Total		Dengan Pembatasan / With Restrictions	Tanpa Pembatasan / Without Restrictions	Total	
Penerimaan				2a, 2k, 13-14				Receipts
Dana dari Donor	8.878.753.168	-	8.878.753.168		9.858.458.328	-	9.858.458.328	Fund from Donors
Dana dari non Donor	44.145.692	2.068.652.497	2.112.798.189		266.148.207	2.366.060.324	2.632.208.531	Fund from non-Donors
Pengembalian dana ke Donor	-	-	-		(1.487.970.639)	(334.005.242)	(1.821.975.881)	Refund to Donors
Total penerimaan	8.922.898.860	2.068.652.497	10.991.551.357		8.636.635.896	2.032.055.082	10.668.690.979	Total receipts
Beban				2a, 2k, 15-16				Expenditures
Penelitian dan publikasi	2.196.203.596	-	2.196.203.596		3.132.117.620	-	3.132.117.620	Research and Publication
Tindakan advokasi dan politik	449.392.587	-	449.392.587		964.170.832	-	964.170.832	Advocacy and political action
Publikasi, dokumentasi, dan informasi	177.714.500	39.229.417	216.943.917		122.000.000	-	122.000.000	Publication, documentation, and information
Pengembangan kapasitas	781.502.018	31.628.333	813.130.351		886.015.814	30.421.000	916.436.814	Capacity development
Biaya personal	4.244.475.060	1.057.188.735	5.301.663.795		3.865.419.185	1.482.366.459	5.347.785.644	Personal cost
Institusional	206.908.761	1.161.298.605	1.368.207.366		223.255.941	996.983.331	1.220.219.272	Institutional
Administrasi umum	424.635.959	5.258.309	429.894.269		666.235.406	32.547.476	698.782.882	General administration
Penyusutan	-	111.256.007	111.256.007		-	36.788.985	36.788.985	Depreciation
Pengeluaran proyek khusus	-	-	-		193.991.578	-	193.991.578	Special project expenditure
Total beban	8.480.832.481	2.405.859.406	10.886.691.887		10.053.206.376	2.579.087.251	12.632.293.627	Total expenses
SURPLUS (DEFISIT)	442.066.379	(337.208.909)	104.859.470		(1.416.570.480)	(547.032.169)	(1.963.602.649)	SURPLUS (DEFISIT)

Catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Notes to the financial statements as an integral part of the financial statements as a whole

INTERNATIONAL NGO FORUM ON INDONESIAN
DEVELOPMENT (INFID)
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

INTERNATIONAL NGO FORUM ON INDONESIAN
DEVELOPMENT (INFID)
STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(In Rupiah, unless otherwise stated)

URAIAN	2020	2019	DESCRIPTIONS
Total penerimaan	10.991.551.357	10.668.690.979	Total receipts
Total beban	10.886.691.887	12.632.293.627	Total expenditures
Kenaikan (penurunan) aset neto	104.859.470	(1.963.602.649)	Increased (decrease) in net assets
Aset neto awal tahun	3.687.693.249	5.526.793.197	Net asset at the beginning of the year
Penyesuaian aset bersih terikat	(18.150.000)	124.502.700	Restricted net asset adjustment
Aset Neto Akhir Tahun	3.774.402.719	3.687.693.249	Net Assets at the End of the Year

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements are an integral part of these financial statements.

INTERNATIONAL NGO FORUM ON INDONESIAN
DEVELOPMENT (INFID)
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

INTERNATIONAL NGO FORUM ON INDONESIAN
DEVELOPMENT (INFID)
STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2020 AND 2019
(In Rupiah, unless otherwise stated)

URAIAN	2020	2019	DESCRIPTIONS
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Aset neto sebelum depresiasi	(6.396.537)	(2.000.391.634)	Net assets before depreciation
Penyesuaian arus kas			Adjustment for reconcile cash flows
Koreksi aset neto	(18.150.000)	124.502.700	Net assets Correction
Depresiasi aset tetap	111.256.007	36.788.985	Depreciation of fixed assets
Arus kas sebelum perubahan aset neto	86.709.470	(1.839.099.949)	Cash flows before changes net assets
Perubahan modal kerja			Changes working capital
Piutang	(64.598.674)	(594.505.000)	Account receivables
Uang muka	39.837.383	147.696.117	Advances
Biaya dibayar dimuka	(5.225.037)	(12.199.935)	Prepaid expenses
Biaya yang masih harus dibayar	1.108.358.292	640.160.487	Accrued expenses
Utang pajak	(31.677.739)	(15.888.284)	Tax payable
Titipan dana	298.057.370	-	Reserved funds
Arus kas bersih dari operasional	1.431.461.065	(1.673.836.564)	Net cash flows from operating
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Investasi	(298.057.370)	-	Investment
Penambahan aset tetap	(32.350.000)	(550.209.200)	Additional fixed assets
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	(330.407.370)	(550.209.200)	Net cash flows from investing
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Liabilitas	-	-	Liabilities
Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	-	-	Net cash flows from financing
Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	1.101.053.695	(2.224.045.764)	Net increase (decrease) in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun	3.487.480.813	5.674.737.592	Cash and cash equivalents at the beginning of the year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	4.699.790.514	3.487.480.813	Cash and cash equivalents at the end of the year

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

See notes to statement receipt and expenditures that accompanying from this financial statement



NGO in Special Consultative Status
with the Economic and Social Council of the United Nations, Ref. No: D1035

Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540
021 7819734, 7819735 | info@infid.org | www.infid.org

Follow Us:

